

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut.

1. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkup BPSDM Provinsi DKI Jakarta, maka salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui pengembangan Kompetensi bagi Aparatur. Target yang diinginkan dalam peningkatan kompetensi pegawai yaitu terciptanya pegawai yang profesional yang dapat memenuhi kebutuhan lembaga karena perkembangan global menuntut tersedianya pegawai yang mampu untuk mengoperasikan sarana kerja sehingga menghasilkan output yang lebih baik. Oleh sebab itu, pengembangan Sumber Daya Manusia lingkup BPSDM Provinsi DKI Jakarta melalui program pengembangan kompetensi dikatakan sudah efektif dilaksanakan.

2. Analisis internal yang berhasil didapatkan peneliti yakni faktor yang mendukung keberlangsungan organisasi setidaknya dalam satu periode kerja kedepan diantaranya sudah menerapkan standar manajemen mutu yang didapat dari lembaga sertifikasi, dengan mengantongi sertifikasi ISO SMM 9001;2015, selain itu BPSDM DKI Jakarta sudah mengantongi Akreditasi terutama bagi penyelenggaraan Diklat kepemimpinan tingkat III dan Diklat kepemimpinan Tingkat IV, adapun seluruh pegawai di BPSDM Prov. DKI Jakarta sudah

mengantongi akreditasi *Training Of course, training of fasilitator* serta *management of trainer*, hal ini didukung oleh peluang yang didapat melalui adanya kebijakan dari pemerintah pusat dengan adanya pengukuran organisasi perangkat Daerah yang dalam dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta mempunyai kriteria Organisasi "A".

3. selain membahas sisi internal organisasi khususnya kekuatan, adapun penulis sendiri menganalisis apa saja faktor yang menjadi kelemahan serta ancaman yang difokuskan dari pihak eksternal yakni; belum terbangunnya fasilitas kelas dan asrama yang dimiliki oleh badan pengembang sumber daya manusia pro. DKI Jakarta, BPSDM DKI Jakarta sendiri masih berproses dalam pembentukan lembaga sertifikasi profesi di lingkup internal organisasi, dan kelemahan yang dimiliki bpsdm provinsi DKI Jakarta yang terakhir ialah belum semua tenaga pengajar atau widyaiswara memiliki sertifikasi *Training of trainer*. Sejalan dengan kelemahan yang harus bisa ditanggulangi internal organisasi, adapun faktor ancaman yang dihadapi organisasi seperti belum adanya standar kompetensi yang ditetapkan pada seluruh jabatan fungsional tertentu maupun Non-JFT, Keterbatasan anggaran untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi, sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai dan ada beberapa yang masih dalam tahap pembangunan, serta belum didukung oleh teknologi pendidikan yang optimal

4. adapun beberapa langkah atau upaya BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi ancaman dan kelemahan yakni dengan strategi adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan/ hambatan dalam menghindari ancaman adalah strategi ekstensifikasi yaitu: Melakukan pengkajian yang lebih

detail dan terperinci mengenai sumber dayadan utamanya pembangunan sarana prasarana serta pemulihan sarana yang masih dalam masa perbaikan dan menjalin kerjasama dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dalam hal ini BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat terkait pengembangan sumber daya aparatur.

Dan strategi intensifikasi yaitu: meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pegawai internal dimulai dari staff hingga tenaga pengajar (*widyaiswara*), meningkatkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar, serta meningkatkan pelayanan kepada aparatur dilingkup pemerintahan provinsi DKI Jakarta

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Rekomendasi Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai penambahan referensi keilmuan Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam kajian manajemen strategi sektor publik ataupun dalam lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia di sektor publik.

Peneliti sangat merekomendasikan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang hendak melakukan penelitian selanjutnya yang *relatable* untuk melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama serta peneliti dapat mengadakan penelitian lanjutan dengan menggunakan teori-teori dan metodologi yang berbeda guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Untuk mahasiswa Universitas Islam “45” Bekasi agar menjadi sebuah pembelajaran ilmu mengenai strategi Organisasional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam peningkatan Kompetensi Aparatur dilingkup Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung Percepatan Reformasi Birokrasi

Bagi Universitas Islam “45” Bekasi dengan hasil penelitian yang saya hasilkan ini semoga menjadi sumbang asih bagi Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan bermanfaat untuk orang banyak terutama mahasiswa/I dan para dosen agar dapat melaksanakan penelitian yang lebih baik untuk kedepannya khususnya terkait dengan Manajemen Strategis di sektor pemerintahan

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud ingin memberikan beberapa rekomendasi atau saran bagi lembaga atau instansi terkait dengan harapan dapat bermanfaat bagi lembaga atau instansi tersebut, yaitu:

1. Pentingnya Bagi BPSDM DKI Jakarta untuk mendukung Kemenpan-RB untuk mendukung percepatan Transformasi Digital yang dalam ini organisasi harus didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan tugas fungsi pengembangan kompetensi ASN dilingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan potensi Sumber daya berupa pegawai, alat elektronik kantor serta Fasilitas penunjang yang dimiliki.

2. Selanjutnya bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta khususnya bagi Kepala daerah yang akan menjabat dalam periode kerja selanjutnya, penting sekali untuk memberi dukungan Bagi BPSD dalam menjalankan pengembangan kompetensi Aparatur hal yang perlu diperhatikan bagi kepala daerah sebagai pemerintah yang memberi kewenangan bagi bpsdm, yakni ialah perbaikan fasilitas sarana prasarana, dibutuhkannya gedung pendidikan khusus bagi kegiatan pelatihan, pemulihan sarana gedung yang berada di Cirascas agar dapat dimanfaatkan oleh BPSDM provinsi DKI Jakarta.
3. Dengan adanya Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 mengenai *Grand Design* Reformasi Birokrasi dilingkup Nasional yang mencangkup percepatan Reformasi birokrasi di daerah maupun pemerintah pusat. Pentingnya pelaksanaan pembangunan birokrasi bidang manajemen aparatur didukung teknologi informasi dapat membantu percepatan transformasi birokrasi ke arah birokrasi yang bersih dan melayani, terciptanya semangat aparatur yang melayani yang didukung oleh kelembagaan, serta didukung oleh teknologi informasi agar mampu memberikan perubahan bagi kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta dalam tahun-tahun berikutnya.
4. Pentingnya kontrol bersama bagi seluruh masyarakat Ibu kota Jakarta, aparatur pemerintahan SKPD/OPD di wilayah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, lebih aktif untuk berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah untuk mencapai tujuan dari apa yang sudah direncanakan kepala daerah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan jangka menengah daerah

5. Kedepannya dapat memberikan penginformasian yang lebih informatif setiap program Pembangunan SDM yang telah dilaksanakan dan laporan keuangan kepada masyarakat dapat menggunakan media seperti internet seperti website, sosial media

